

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERKELANJUTAN BERORIENTASI POTENSI DAN KAREKTERISTIK WILAYAH MALUKU UTARA

Muhammad Assagaf¹, Yayat Hidayat¹ dan Abdul Wahab¹

¹Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara
Kompleks Pertanian Kusu No. 1, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan
Email : assagaf_met@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari penulisan makalah ini untuk memberikan gambaran agribisnis berkelanjutan komoditas unggulan yang sesuai dengan potensi dan karakterisasi wilayah Maluku Utara. Strategi yang dapat dikemukakan dalam pengembangan agribisnis di Maluku Utara kedepannya adalah 1) Pendekatan sistem dalam pengembangan agribisnis berkelanjutan, 2) Berdayakan Potensi dan karakteristik wilayah kepulauan, 3) Dukungan dari pemerintah daerah berupa regulasi dan infrastruktur, 4) Komoditas pertanian tertentu harus diolah di Maluku Utara (industrialisasi pertanian), 5) Agribisnis berbasis komoditas unggulan dan daya saing, 6) Peningkatan kapasitas SDM Petani dan UMKM, 7) Pola kemitraan dalam pengembangan agribisnis, dan 8) Memacu pertumbuhan sektor terkait di luar pertanian. Disamping itu Pengembangan agribisnis komoditas unggulan ke depan harus memperhatikan factor biofisik lingkungan yang membatasi agar dapat tempuh langkah-langkah untuk peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tersebut. Penetapan zonasi agroekologi suatu komoditas dan kemudahan petani dalam membangun agribisnis melalui pendekatan subsistem mulai dari subsistem agribisnis input sampai dengan subsistem agribisnis kelembagaan penunjang dilengkapi dengan penerapan teknologi dan bimbingan teknis yang sesuai kebutuhan. Peningkatan daya saing produk unggulan pertanian yang dilakukan melalui pengembangan agribisnis dalam perspektif industrialisasi pertanian dengan pendekatan pengembangan agribisnis sebagai suatu system agribisnis berkelanjutan akan menghasilkan produk pertanian yang sesuai dengan permintaan pasar dan preferensi konsumen sebagai pengguna akhir.

Kata Kunci: *Agribisnis, berkelanjutan, potensi, karakteristik wilayah, daya saing*

Abstract

The paper aims to provide an overview of superior commodity sustainable agribusiness in accordance with the potential and characterization of the North Moluccas region. Strategies that can be presented in the development of agribusiness in North Moluccas in the future are 1) A system approach in sustainable agribusiness development, 2) Empowering the potential and characteristics of the archipelago, 3) Support from local governments in the form of regulations and infrastructure, 4) Certain agricultural commodities must be processed in Maluku North (agricultural industrialization), 5) Agribusiness based on superior commodities and competitiveness, 6) Increasing the capacity of the Human Resources of Farmers and Micro Small and Medium Enterprises, 7) Partnership patterns in agribusiness development, and 8) Spurring the growth of related sectors outside of agriculture. In addition, the development of leading commodity agribusiness in the future must pay attention to limiting environmental biophysical factors in order to take steps to increase the production and productivity of these commodities. Determining the agroecological zoning of a commodity and the ease with which farmers build agribusiness through a subsystem approach ranging from the input agribusiness subsystem to the agribusiness subsystem supporting institutions is equipped with the application of technology and technical guidance as needed. Increasing the competitiveness of superior agricultural products carried out through agribusiness development in the perspective of agricultural industrialization with an agribusiness development approach as a sustainable agribusiness system will produce agricultural products that are in accordance with market demand and consumer preferences as end users.

Keywords: *Agribusiness, sustainable, potential, regional characteristics, competitiveness*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini disamping permasalahan pandemic Covid-19 juga akibat yang ditimbulkan oleh kondisi saat ini yang berdampak pada sector ekonomi, ketahanan pangan dan permasalahan yang telah ada sebelum pandemic yaitu masalah lingkungan, kemiskinan, meningkatnya angka pengangguran dan serta permasalahan yang kompleks lainnya.

Saragih, B (2001), menyampaikan untuk meminimalisir permasalahan ekonomi yang begitu kompleks diperlukan langkah strategis dalam pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jalan keluar. Langkah strategis yang dimaksud diupayakan memiliki karakteristik berupa kemampuan mengatasi permasalahan ekonomi dalam tahap perencanaan dan implementasi, langkah strategis harus memiliki keterkaitan dengan upaya pembangunan pada masa lalu dan mampu membawa ekonomi Indonesia yang mampu bersaing diperekonomian global. Langkah strategis yang dilakukan melalui pembangunan agribisnis pertanian berkelanjutan dengan mengedepankan daya saing produk yang dihasilkan (Saragih, B. 1998).

Pembangunan agribisnis berkelanjutan yang berorientasi pada potensi sumberdaya yang dimiliki dan karakteristik wilayah yang beragam akan mendorong system agribisnis yang dapat menghasilkan produk dengan daya saing yang tinggi. Pembangunan agribisnis berkelanjutan di Maluku Utara tentunya tetap memperhatikan kemampuan sumberdaya manusia, karekteristik social dan budaya Masyarakat Maluku Utara serta ketersediaan teknologi yang dapat menjamin keberlanjutan usaha agribisnis. Tujuan dari penulisan makalah ini untuk memberikan pemahaman pendekatan system agribisnis berkelanjutan komoditas unggulan yang sesuai dengan potensi dan karakterisasi wilayah Maluku Utara.

KARAKTERISTIK DAN RUANG LINGKUP AGRIBISNIS

Nilai tambah yang maksimal secara kompetitif akan membuka peluang untuk peningkatan nilai tambah usaha dan lapangan kerja (Muta'ali, 2003). Dalam meraih nilai tambah tersebut, agribisnis tidak terbatas pada budidaya saja tapi juga harus pada subsistem

agribisnis yang lain. Ditinjau dari sudut perilaku, pembangunan daerah khususnya bidang pertanian dalam menanggapi era industrialisasi dan globalisasi serta tuntutan pasar membutuhkan wawasan agribisnis yang komprehensif dan juga perlu pemahaman pendekatan agribisnis sebagai suatu sistem (Erickson, 1987).

Secara konsep sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas mulai dari subsistem input sampai kepada pemasaran yang terkait satu dengan lain. Dengan demikian sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yaitu (a) subsistem input, (b) subsistem budidaya atau usaha tani, (c) subsistem pengolahan, (d) subsistem pemasaran hasil perkebunan, (e) subsistem prasarana, dan (f) subsistem pembinaan (Anonim, 1995).

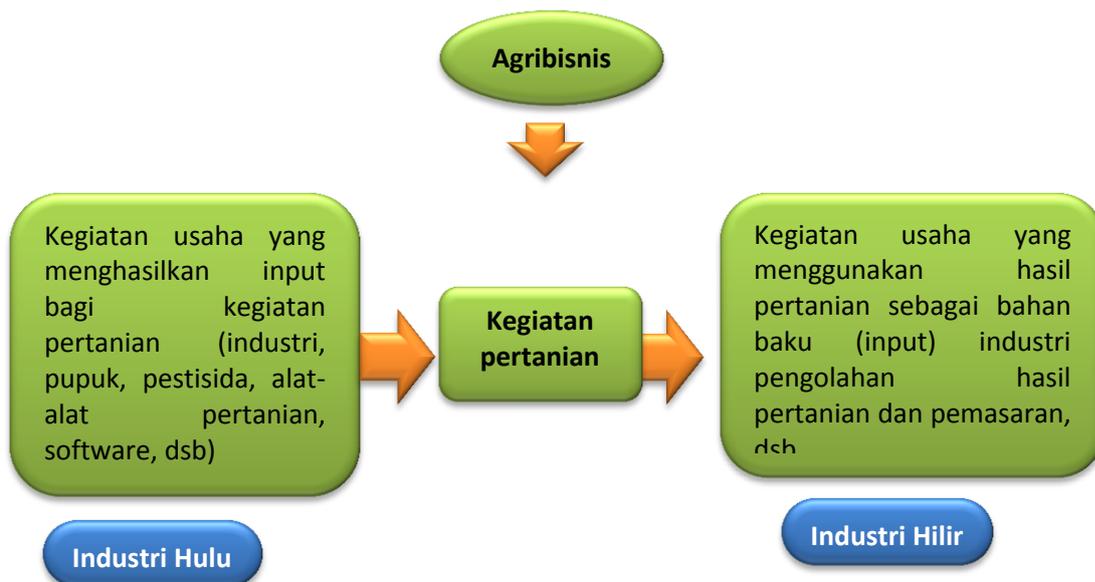
Sistem agribisnis tersebut di atas merupakan suatu rangkaian aktivitas yang saling berkaitan yang keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh tingkat kehandalan dari setiap komponen yang menjadi subsistemnya. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan pemerintah melalui regulasi, koordinasi, stimulasi, pelayanan terhadap seluruh subsistem beserta lingkungan yang mempengaruhinya. Di samping pemahaman tentang wawasan agribisnis dan agribisnis sebagai suatu sistem, sebagai sebuah "entity" agribisnis juga terkait dengan pelaku agribisnis atau struktur masyarakat, baik yang berdimensi teritorial, fungsional dan profesional, serta regional dan global.

PENDEKATAN SISTEM DALAM AGRIBISNIS

Kemajuan yang dialami di sektor agribisnis tidak terlepas dari dukungan kelembagaan agribisnis. Cakupan agribisnis yang begitu luas, melibatkan cukup banyak lembaga untuk menanganinya, beberapa diantaranya ialah lembaga perbankan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, pergudangan, penelitian, pendidikan, penyuluhan serta lembaga swadaya masyarakat lainnya. Secara umum kegiatan agribisnis perlu dilakukan secara terpadu. Namun kegiatan agribisnis masih terkotak-kotak. Misalkan yang memproduksi bahan baku adalah DIPERINDAG, serta masalah keamanan makanan dan minuman diatur oleh departemen kesehatan sehingga masih sulit

koordinasinya. Padahal agribisnis adalah satu rangkaian kegiatan yang menyeluruh. Cakupan agribisnis yang cukup luas, melibatkan banyak lembaga, dimana agribisnis mencakup semua kegiatan mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai pada kegiatan pemasaran produk-produk yang dihasilkan usahatani atau produk lain. Dengan demikian agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri

dari (1) subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, (2) subsistem usahatani, (3) subsistem pengolahan hasil pertanian, dan (4) subsistem pemasaran. Karena merupakan sistem dimana setiap subsistemnya banyak lembaga yang terkait, maka keterkaitan antar subsistem tersebut Sangat erat. Keberhasilan agribisnis tergantung pada kemajuan-kemajuan yang dapat dicapai di setiap subsistemnya.



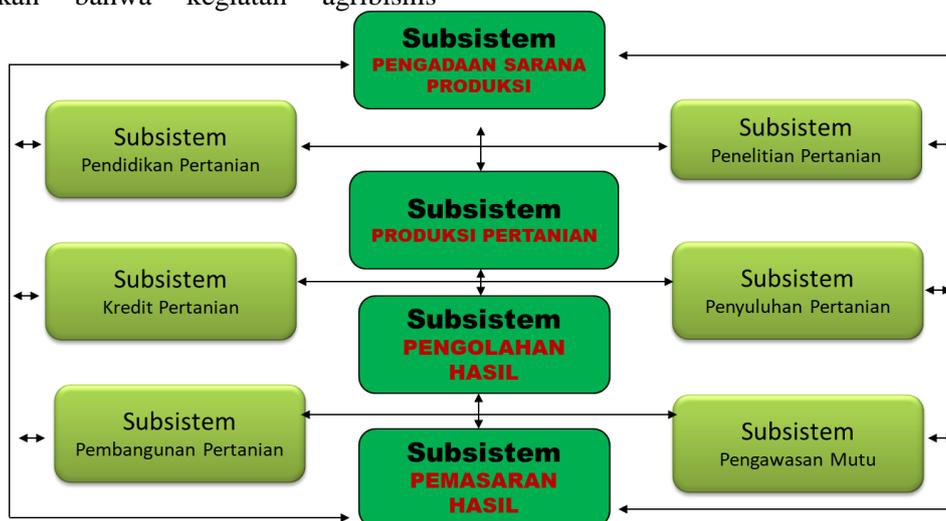
Gambar 1. Cakupan Agribisnis dan kegiatan pertanian mulai dari hulu sampai hilir



Gambar 2. Agribisnis dengan pendekatan Subsistem

Davis, H.J. dan Golberg (1957), dalam tulisannya yang berjudul “A concept of agribusiness” menuliskan bahwa agribisnis berasal dari kata *Agribusiness* di mana *Agr* = *Agriculture* artinya pertanian dan *Business* artinya usaha atau kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Jadi Agribisnis adalah kegiatan usaha pertanian yang berhubungan dengan usaha tani pertanian secara umum meliputi komoditas pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan yang memiliki pasar dan daya saing. Antara, M (2000), menyampaikan bahwa agribisnis merupakan konsep dari suatu sistem yang integratif dan terdiri dari beberapa subsistem, yaitu; 1) subsistem input (*agroindustry hulu*), 2) subsistem produksi usahatani, 3) subsistem pengolahan dan industri hasil pertanian (*agroindustri hilir*), 4) subsistem pemasaran, dan 5) subsistem kelembagaan penunjang. Uraian di atas menunjukkan bahwa kegiatan agribisnis

merupakan; a) kegiatan yang berbasis pada keunggulan sumberdaya alam dengan penerapan teknologi dan sumberdaya manusia bagi perolehan nilai tambah (*off-farm agribusiness*), b) kegiatan yang memiliki spektrum yang luas, dari skala usaha kecil, rumah tangga hingga skala usaha raksasa. Sehingga usaha mempercepat pertumbuhan sektor agribisnis dengan kondisi petani yang lemah (modal, skill, pengetahuan dan penguasaan lahan yang terbatas) akan dapat ditempuh melalui penerapan sistem pengembangan agribisnis. Pengembangan agribisnis adalah merupakan system yang mampu memberikan keuntungan bagi pelaku-pelaku agribisnis (petani/ peternak/ pekebun/nelayan/ pengusaha kecil dan menengah/ koperasi), dengan target akan memperoleh nilai tambah secara ekonomi dan menfaat.

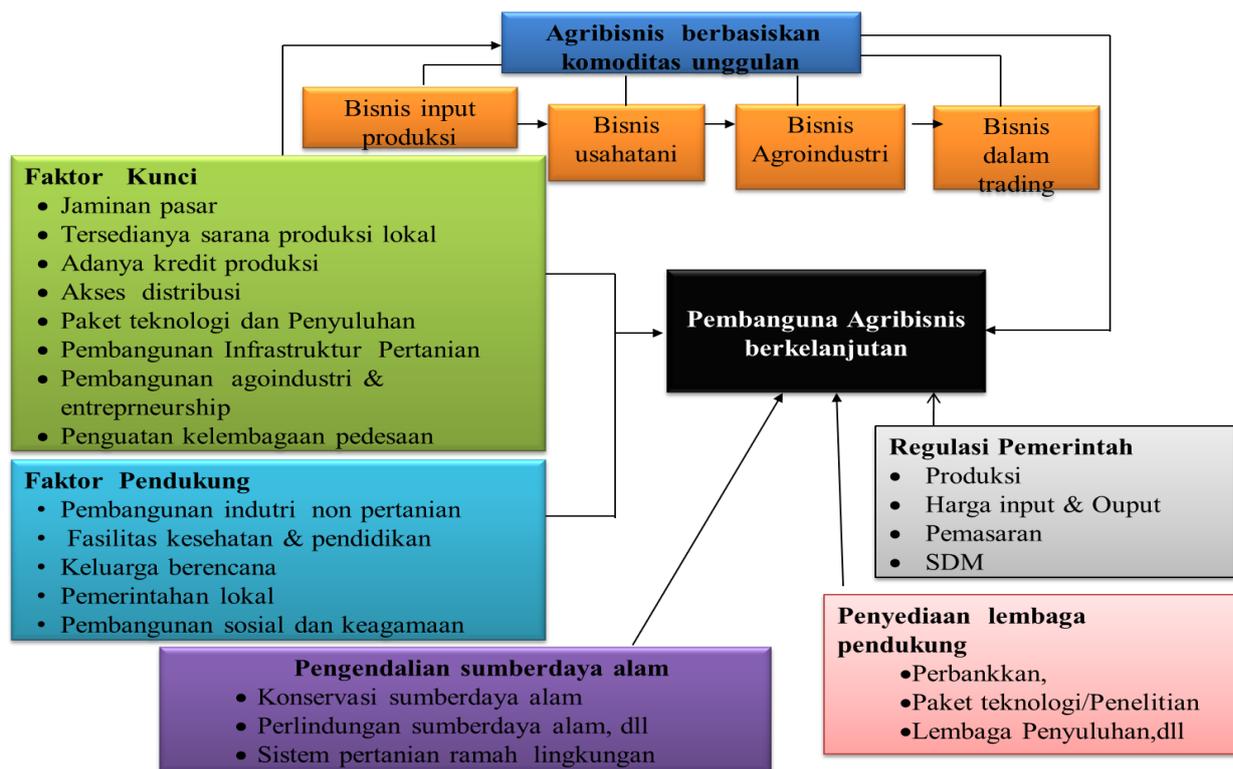


Gambar 3. Keterkaitan antara Agribisnis dengan subsistem penunjang diluar agribisnis

Pembangunan pertanian secara Nasional mencakup potensi sumberdaya alam dan potensi pasar dari produk agribisnis dimana dukungan yang dibutuhkan untuk pengembangan agribisnis memerlukan dukungan berupa a) amanat konstitusi yang termuat dalam UU No.22 tahun 1999 UU No. 25 tahun 1999 dan PP 25 tahun 2000 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah, c) keragaman hayati yang memiliki keunggulan komperataif dan kompetitif, d) sumberdaya local yang tidak memerlukan impor, dan e). produk agribisnis pertanian yang memiliki keunggulan (Saragih, B. 2001).

Disamping itu, isu krisis pangan dunia pada saat ini makin diperparah dengan adanya

krisis ekonomi dimana pandemik covid-19 belum diketahui kapan berakhir, namun sumber pangan kita yang tidak terpengaruh dengan import masih memberikan peluang bagi pengembangan agribisnis Indonesia. Kita memiliki ruang gerak dalam pengembangan agribisnis terutama bahan pangan dan serat (tekstil, barang-barang karet, kertas, bahan bangunan dan kayu) yang menguntungkan Indonesia ke depan. Kesadaran masyarakat dunia akan kelestarian lingkungan hidup sehingga mendorong masyarakat dunia mengkonsumsi organik dan meningkatnya penggunaan produk berbasis energy yang ramah lingkungan dan serat tanaman.



Gambar 4. Faktor-faktor yang mendukung Pembangunan Agribisnis Berkelanjutan

Perubahan lingkungan strategis dan isu-isu globalisasi serta liberisasi perdagangan menuntut pemerintah untuk mengembangkan sistem dan usaha agribisnis yang memiliki kemampuan untuk bersaing dan sepenuhnya dilakukan oleh petani dan memiliki potensi untuk diusahakan secara berkesinambungan. Pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu pendekatan system dalam agribisnis yang mencakup : 1) subsistem Agribisnis Input, yang mencakup kegiatan pertanian maupun diluar pertanian yang mendukung mulai dari perbenihan, penyediaan saprodi maupun barang-barang modal lainnya; 2)Subsistem agribisnis Produksi/usahatani, yang mencakup kegiatan usahatani pada tahap budidaya yang menghasilkan produk primer; 3) Subsistem agribisnis pengolahan yang mencakup kegiatan pengolahan produk pertanian untuk menghasilkan yang langsung dapat dikonsumsi oleh konsumen atau produk setengah jadi yang harus diolah lebih lanjut; dan 4) Subsistem agribisnis Pendukung atau kelembagaan agribisnis yang meliputi kelembagaan ekonomi petani, kelembagaan ekonomi diluar petani, lembaga penelitian, lembaga penyuluhan, lembaga pelatihan, transportasi dan lembaga penunjang lainnya

(Davis dan Golberg, 1957; Downey dan Steven, 1987).

Pendekatan Sistem dan usaha agribisnis yang dikembangkan pemerintah, diharapkan dapat memberikan peran bagi petani dalam sistem dan usaha agribisnis, dimana sumber daya alam yang dimiliki, teknologi spesifik lokasi, kearifan lokal, ekonomi berlandaskan Budaya lokal dan menempatkan petani sebagai pelaku utama agribisnis. Keberlanjutan dari pendekatan system pada usaha agribisnis didorong dari aspek ekonomi, teknologi maupun dari lingkungan. Kedepan dari sisi ekonomi, pembangunan dengan pendekatan system pada usaha agribisnis harus berlandaskan pada potensi dan karakteristik wilayah yang dimiliki dan kelembagaan ekonomi yang ada dan menempatkan inovasi teknologi ramah lingkungan dan kemampuan petani sebagai sumber utama dalam mewujudkan usaha agribisnis yang berkelanjutan.

Perspektif pembangunan pertanian berorientasi potensi dan karakteristik wilayah memberikan perhatian yang lebih atas sinergi antar sektoral, spasial, serta pelaku pembangunan inter dan antar daerah. Sinergitas sektoral membutuhkan adanya keterpaduan fungsional antar sektor

pembangunan sehingga setiap program pembangunan sektoral selalu dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah (Rustiadi *et al.*, 2006). Pembangunan Sektor/komoditas unggulan pada daerah berbasis pada beberapa kriteria, antara lain: mampu meningkatkan produksi dan produktifitas, efisien, berkesinambungan, memiliki daya saing, memiliki keterkaitan dengan daerah lain, merupakan usaha yang padat karya, mampu bertahan pada kondisi yang sulit, merupakan usaha pertanian yang ramah lingkungan serta resisten terhadap gejolak eksternal dan internal.

Pengembangan agribisnis berkelanjutan yang efisien bermula pada penentuan komoditas unggulan suatu daerah yang memiliki daya saing (Keunggulan komparatif dan kompetitif) dalam menghadapi persaingan pasar global. Konsep komoditas unggulan adalah komoditas yang disuatu daerah memiliki posisi strategis, dengan keunggulan pada factor teknis terutama biofisik (kondisi tanah dan iklim), factor sosial budaya dan ekonomi serta kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia dan factor input lainnya), untuk dikembangkan di suatu wilayah (Hendayana, 2003).

Dalam makalah ini akan diuraikan lebih jauh tentang potensi dan karakteristik wilayah

dari komoditas perkebunan unggulan Maluku Utara khususnya Komoditas Kelapa. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.472 tahun 2018 tentang penetapan kawasan pengembangan komoditas pertanian, kawasan pengembangan kelapa di Maluku Utara terdapat di Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai memiliki 4 komoditi unggulan, yaitu kelapa, cengkeh, pala, dan kakao. Pada tahun 2018, tanaman kelapa memiliki luas area 12.890 Ha dan produksi sebesar 10.721 Ton yang melibatkan 7.918 keluarga petani yang mengusahakannya (Tabel 1).

Sebaran luas areal tanaman kelapa di Kabupaten Morotai berdasarkan status tanaman, produksi dan jumlah keluarga petani yang mengusahakannya di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten ini disajikan pada Tabel 2. Kecamatan Morotai Selatan Barat adalah kecamatan dengan luas areal tanaman kelapa dan produksi yang tertinggi dibandingkan dengan 4 kecamatan lainnya, dimana tanaman kelapa yang telah menghasilkan seluas 2.805 ha dengan produksi setara kopra sebesar 3.388 ton dengan jumlah keluarga petani yang terlibat dalam pengusahaan sebesar 2.503 kepala Keluarga.

Tabel 1. Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Pemilik Kelapa di Kabupaten Pulau Morotai, 2014-2017

No	Tahun	Luas areal (Ha)	Produksi (ton)	Petani (KK)
1	2014	12.374	9934	7.918
2	2015	12.477	10.719	7.918
3	2016	Na	Na	na
4	2017	12.775	10.721	7.935
5	2018	12.890	10.721	7.918

Sumber: BPS Pulau Morotai (2015-2019) (Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, 2019)

Tabel 2. Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Pemilik Kelapa menurut Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai, 2018

No	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI (TON)	Jumlah Petani (KK)
		TBM	TM	TTM/TR	JUMLAH		
1	Morotai Selatan	630	1.392	-	2.022	1.682	1.243
2	Morotai Timur	629	1.390	-	2.019	1.679	1.240
3	Morotai Selatan Barat	1.270	2.805	-	4.075	3.388	2.503
4	Morotai Utara	779	1.720	-	2.499	2.078	1.535
5	Morotai Jaya	709	1.566	-	2.275	1.893	1.397
	JUMLAH	4.017	8.873	-	12.890	10.721	7.918

Sumber: BPS Pulau Morotai (2019)

Pengembangan perkebunan Kelapa di Kabupaten Pulau Morotai terdapat dalam dua tipe utama yaitu Perkebunan Kelapa Monokultur dan Campuran antara Kelapa dengan pala, cengkeh dan tanaman hortikultura (pisang, manga, durian, cabe,

terung, kacang panjang) dan tanaman pangan/semusim (jagung, ubikayu dan kacang tanah). Beberapa tipe pengembangan perkebunan Kelapa di Kabupaten Pulau Morotai terdapat pada Gambar 5.



a. Perkebunan kelapa Monokultur



b. Campuran (kelapa dan cengkeh)

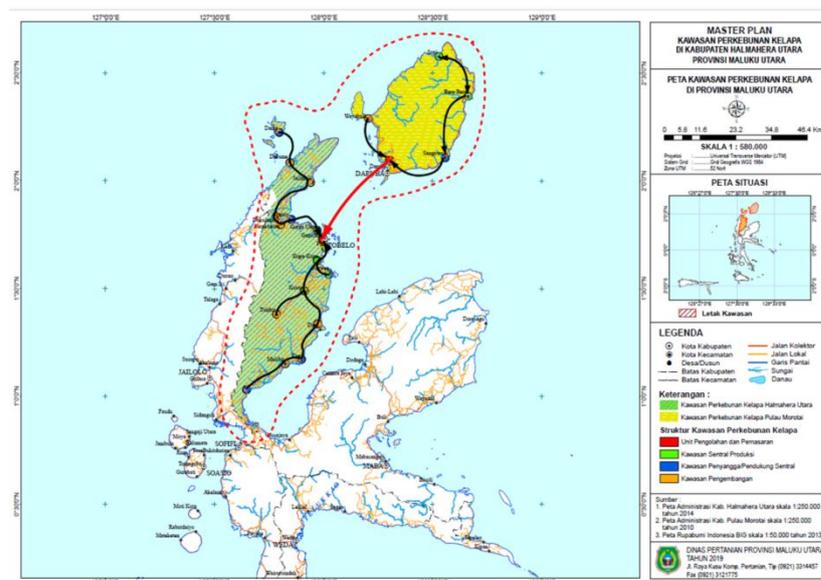


c. Campuran (Kelapa dan pala)



d. Campuran (kelapa, cengkeh, pisang dan ubikayu)

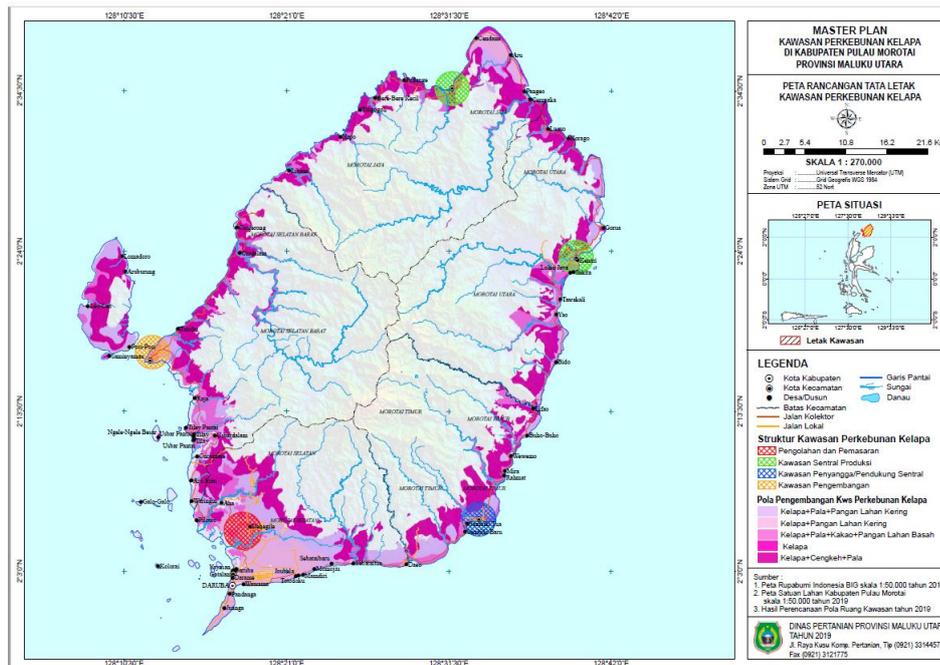
Gambar 5. Tipe penggunaan lahan di Kawasan Pengembangan Perkebunan Kelapa di Kabupaten Pulau Morotai



Gambar 6. Peta Kawasan Perkebunan Kelapa di Maluku Utara (Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara)

Dari data spasial yang tersusun dalam peta baik peta kawasan perkebunan di Maluku Utara dan Peta Tataletak kawasan perkebunan kelapa di Kabupaten Pulau Morotai yang disajikan pada Gambar 6 dan 7 memberi gambaran bahwa penetapan lokasi pengembangan komoditas kelapa di Maluku Utara yang focus pada dua Kabupaten tersebut telah sesuai dengan arahan penggunaan lahan yang berdasarkan pada potensi dan

karakteristik wilayah yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten pengembangan. Pola ruang yang disusun dalam pengembangan kawasan komoditas kelapa di Kabupaten Pulau Morotai disajikan pada Table 3. Dimana kemungkinan pola tanaman dari kelapa dikabupaten ini dimungkinkan dibagi dalam 3 pola perkebunan kelapa yaitu monokultur dan polikultur dalam bentuk kebun campuran yang umum diterapkan oleh petani di Maluku Utara.



Gambar 7. Peta Tataletak Kawasan Perkebunan Kelapa Kabupaten Pulau Morotai

Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Kelapa Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan pada tipe lahan basah pada subzona IV/We-1 dan IV/We-2 seluas 43,242.3 ha (12,3%) dan tipe lahan kering pada subzona IV/De-3, IV/De-4, IV/De-5, VII/De, III/De-3, III/De-4, II/De-3 dan II/De-4 dengan luas total 92.472,0 ha (26,2%). Subzona tanaman perkebunan berbasis kelapa baik pada lahan basah maupun lahan kering tersebut, diarahkan untuk pengembangan tanaman utama yaitu kelapa dan tanaman sisipan lainnya diantaranya pala cengkeh dan kakao.

Pengembangan tanaman kelapa dalam jumlah terbatas juga dapat dilaksanakan pada IV/De-2, III/De-2 dan II/De-2 dengan luas 748,4 ha (0,2%). Kedua subzona tersebut merupakan subzona pada Kawasan CAPAI yang diarahkan untuk pengembangan tanaman cengkeh sebagai tanaman utama dan tanaman

sisipan lainnya yaitu kelapa (Dinas Prov.Maluku Utara.2019).

Kabupaten Halmahera Utara merupakan wilayah Kabupaten yang memiliki tanaman kelapa terluas yaitu 48.598 ha atau 22,5% dari total luas kelapa Maluku Utara. Total produksi kelapa tahun 2018 sebesar 70.702 ton dengan tingkat produktivitas sebesar 1,8 ton/ha dan melibatkan sebanyak 32.242 rumah tangga tani.

Dari Table 4 diatas disajikan data kecamatan yang merupakan kawasan pengembangan komoditas kelapa di Kabupaten Halmahera Utara di mana dari ketiga kecamatan ini dapat menyumbang produksi kelapa setara kopra sebanyak 71.498 ton dengan melibatkan 33.368 keluarga petani perkebunan kelapa untuk luas tanam mencapai 49.167 ha.

Tabel 3. Rencana Pola Ruang Kawasan Perkebunan Kelapa di Kabupaten Pulau Morotai

No	Rencana Pola Peruntukan Kawasan	Luas	
		Ha	%
1	Kawasan Pertanian Lahan Basah	601.6	0.3
	Padi Sawah	572.1	0.2
	Tambak	29.5	0.01
2	Kawasan Perkebunan Berbasis Kelapa	60,085.2	25.6
	Kelapa+Pala+Kakao+Pangan Lahan Basah	11,933.0	5.1
	Kelapa+Pangan Lahan Kering	6,905.7	2.9
	Kelapa+Pala+Pangan Lahan Kering	12,408.5	5.3
	Kelapa	893.2	0.4
	Kelapa+Cengkeh+Pala	27,944.8	11.9
3	Kawasan Permukiman	1,380.0	0.6
	Permukiman dan Bangunan Lainnya	1,380.0	0.6
4	Kawasan Hutan Konservasi dan Budidaya Hutan	78,346.4	33.4
	Hutan Konservasi Lahan Basah Hutan	1,456.3	0.6
	Konservasi Lahan Kering Hutan Produksi	294.5	0.1
	yg Dapat Dikonversi Hutan Produksi	25,032.0	10.7
	Terbatas	51,563.6	22.0
5	Kawasan Lindung	93,373.1	39.8
	Hutan Lindung	92,945.4	39.6
	Sempadan Pantai	427.7	0.2
Tubuh Air		863.0	0.4
Jumlah		234,649.3	100.0

Sumber : Hasil perencanaan peruntukan ruang, 2019 (Dinas Pertanian Prov.Maluku Utara,2019)

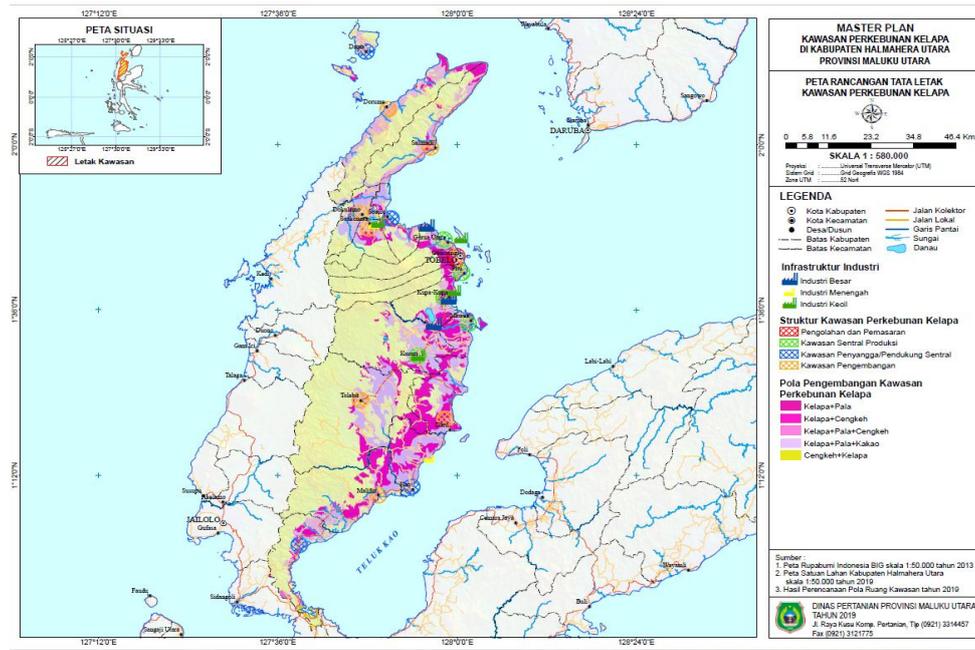
Tabel 4. Luas Areal, Produksi dan jumlah KK petani di Kawasan pengembangan Kelapa Di Kabupaten Halmahera Utara

No	KAWASAN	TBM	TM	TR	Total Luas	Produksi	Jumlah KK
1	Tobelo	2.334	19.856	59	22.249	35.741	12.653
2	Galela	3.871	14.977	42	18.890	26.959	12.995
3	Kao	3.095	4.888	45	8.028	8.798	7.720
	JUMLAH	9.300	39.721	146	49.167	71.498	33.368

Sumber : Dinas Pertanian Prov.Maluku Utara,2019.

Kawasan perkebunan berbasis kelapa merupakan kawasan yang sesuai untuk pengembangan tanaman kelapa baik yang telah ditanami tanaman kelapa dan tanaman perkebunan lainnya maupun yang masih berupa lahan semak dan hutan. Kawasan ini terletak pada tipe lahan basah kemiringan datar (0-3%) dan tipe lahan kering kemiringan landai/berombak (3-5%) sampai agak curam (30-45%) dengan luas sebaran sebesar 135.714,0 ha (38,5%) (Gambar 8 dan Tabel 5). Pengembangan perkebunan berbasis kelapa di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan melalui sistem budidaya campuran. Sistem

budidaya campuran yaitu pengembangan tanaman kelapa sebagai tanaman utama dan tanaman perkebunan lainnya (pala, kakao dan cengkeh) sebagai tanaman sisipan diantara tanaman kelapa dengan populasi tanaman yang terbatas. Arahkan pengembangan sistem budidaya tanaman berbasis kelapa meliputi budidaya kelapa dan pala seluas 50.153,6 ha (14,2%), budidaya kelapa dan cengkeh seluas 692,1 ha (0,2%), budidaya kelapa, pala dan cengkeh seluas 23.958,4 ha (6,8%), dan budidaya kelapa, pala dan kakao seluas 60.909,9 ha (17,3%).



Gambar 8. Rencana Tataletak Pola ruang Kawasan Perkebunan Kelapa di Kabupaten Halmahera Utara

Tabel 5. Rencana Pola Ruang Kawasan Perkebunan Kelapa di Kabupaten Halmahera Utara

Kabupaten Halmahera	Rencana Pola Peruntukan Kawasan	Luas	
		Ha	%
1	Kawasan Pertanian Lahan Basah Padi Sawah	2,070.3	0.6
		2,070.3	0.6
2	Kawasan Perkebunan Berbasis Kelapa	135,714.0	38.5
	Kelapa+Pala	50,153.6	14.2
	Kelapa+Cengkeh	692.1	0.2
	Kelapa+Pala+Cengkeh	23,958.4	6.8
	Kelapa+Pala+Kakao	60,909.9	17.3
3	Kawasan Perkebunan Berbasis Cengkeh	1,931.5	0.5
	Cengkeh	1,005.6	0.3
	Cengkeh+Padi Ladang	146.8	0.04
	Cengkeh+Ternak	30.7	0.01
	Cengkeh+Kelapa	748.4	0.2
4	Kawasan Permukiman	4,610.5	1.3
	Permukiman dan Bangunan Lainnya	4,610.5	1.3
5	Kawasan Hutan Konservasi dan Budidaya Hutan	122,124.6	34.6
	Hutan Konservasi Lahan Basah	1,558.7	0.4
	Hutan Konservasi Lahan Kering	1,927.0	0.5
	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	41,697.0	11.8
	Hutan Produksi	14,309.6	4.1
	Hutan Produksi Terbatas	62,632.3	17.7
6	Kawasan Lindung	84,457.1	23.9
	Hutan Lindung	84,457.1	23.9
Tubuh Air		1,979.6	0.6
Jumlah		352,887.6	100.0

Sumber : Hasil perencanaan peruntukan ruang, 2019 (Dinas Pertanian Prov.Maluku Utara,2019)

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERKELANJUTAN DI MALUKU UTARA

Pengembangan sektor agribisnis dalam pengelolaan komoditi tanaman perkebunan di Maluku Utara masih terbuka lebar dengan dukungan potensi sumber daya alam sebagai keunggulan komparatif. Kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan di Maluku Utara yang sangat prospektif dengan luas lahan mencapai 202.180 ha dan produksi 236.796 ton (BPS, 2020). Di Maluku Utara kelapa dikenal sebagai tanaman rakyat yang secara fungsional lebih berperan sebagai komoditas perdagangan. Hal tersebut karena produk tanaman kelapa terkait erat dengan industri sebagai bahan baku olahan lanjutan. Untuk itu, petani produsen kelapa dituntut untuk dapat menghasilkan suatu produk dengan mutu tertentu supaya mendapatkan harga pasar yang layak.

Produk komoditas perkebunan yang dihasilkan erat kaitannya dengan kegiatan agribisnis, di mana dalam membangun agribisnis berarti mengintegrasikan pembangunan pertanian, industri dan jasa dalam menghasilkan suatu produk. Menurut Saragih (2001) menyatakan bahwa kinerja sistem agribisnis merupakan totalitas atau kesatuan kinerja yang terdiri dari subsistem hulu, usahatani, pengolahan hasil, pemasaran, serta jasa penunjang. Implementasi pengembangan agribisnis kelapa di Maluku Utara terus diintensifkan oleh *stake holder* dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani kelapa.

Pengembangan sistem agribisnis kelapa kedepan dapat disusun sebagai Strategi dalam suatu fungsi proses produksi yang akan menghasilkan produktivitas kelapa secara optimal dan efisien, maka strategi itu dapat diimplementasi melalui keterpaduan dan keberlanjutan kerjasama dari masing-masing subsistem agribisnis (Suprpto (1998) dalam Damanik, 2007). Adapun implementasi yang telah dilakukan dalam pengembangan agribisnis kelapa di Maluku Utara dapat dilihat dari kinerja di subsistem agribisnis sebagai berikut :

Subsistem Agribisnis Hulu

Produksi kelapa yang dihasilkan sangat bergantung dari sumber bibit yang digunakan. Bibit yang unggul dan bersertifikat dapat menjadi salah satu faktor dalam

peningkatan produktivitas kelapa di Maluku Utara. Saat ini petani masih banyak yang menggunakan bibit dari kebun sendiri atau pekebun yang lain. Selain itu, banyak tanaman kelapa yang sudah tua, sehingga produktivitasnya semakin menurun. Berdasarkan data BPS (2020) tingkat produktivitas kelapa di Maluku Utara sebesar 1,17 ton kopra/ha/tahun, padahal produksi kelapa dalam unggul dapat mencapai 2-3 ton kopra/ha/tahun. Upaya penyediaan bibit kelapa unggul sebagai salah satu input dalam peningkatan produksi kelapa telah dilakukan BPTP Maluku Utara yaitu bekerja sama dengan penangkar bibit kelapa. Bibit kelapa tersebut berasal dari PIT kelapa unggul lokal dan kelapa bido yang telah bersertifikat.

Penggunaan pupuk dan obat-obatan untuk komoditas kelapa di Maluku Utara masih sangat terbatas, padahal input tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usahatani kelapa. Ketersediaan pupuk dan obat-obatan tidak menjadi kendala di Maluku Utara, namun lebih ke arah keengganan petani dalam penggunaan input tersebut. Begitu juga dengan input teknologi yang telah dihasilkan belum banyak digunakan karena terkendala informasi dan teknis.

Subsistem Usahatani Kelapa

Usahatani kelapa di Maluku Utara lebih banyak dikelola secara konvensional. Usahatani kelapa tersebut dikelola dalam bentuk perkebunan rakyat yang bercirikan (1) hasil usahatani masih bersifat tradisional yaitu berbentuk kelapa butiran dan kopra, (2) produktivitas rendah, (3) modal lemah, dan (4) penggunaan input teknologi anjuran masih rendah.

Luas pemilikan lahan usahatani yang sempit (1-2 ha) dan jarak tanam yang tidak teratur dengan tanaman campuran di lahannya. Penerapan input teknologi anjuran dalam pengembangan usahatani kelapa belum dilaksanakan, sehingga tingkat produktivitas dan pendapatan masih tergolong rendah. Dalam kondisi demikian pola usahatani terintegrasi merupakan salah satu solusi, dimana model pertanian polikultur dengan integrasi antara tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan dapat meningkatkan pendapatan disamping itu juga dapat menstabilkan pendapatan petani saat terjadi fluktuasi harga suatu komoditas. Menurut Barus (2013) pola usahatani dengan tanaman

sela pada lahan kering di bawah tegakan kelapa sangat menguntungkan karena 80% lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tanaman lain ataupun ternak. Produksi tanaman kelapa Dalam cenderung meningkat apabila di bawahnya ditanami tanaman sela yang dikelola dengan baik.

Rekomendasi teknik budidaya kelapa sistem tumpang sari yang didiseminasi dan diadopsi petani didasarkan pada pencapaian produktivitas dan mutu yang tertinggi dari hasil suatu pengkajian atau penelitian. BPTP telah melakukan kajian terkait pola usahatani tumpang sari kelapa dengan tanaman pangan (jagung dan kedelai) di Maluku Utara, yaitu di Kota Tidore kepulauan, Halmahera Barat dan Halmahera Timur. Hasil penelitian Hidayat, *et al.* (2020) menunjukkan tumpang sari kelapa-jagung meningkatkan 92% efisiensi produktivitas lahan dengan nilai NKL 1,92. Tumpang sari kelapa-kedelai meningkatkan 76% efisiensi produktivitas lahan dengan nilai NKL 1,76. Peningkatan keuntungan usahatani kelapa dari pola tumpang sari kelapa – jagung sebesar Rp. 7.495.800/panen dengan R/C 1,89 sedangkan dari pola tumpang sari kelapa – kedelai sebesar Rp. 4.402.000/panen dengan nilai R/C 1,55.

Petani dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memilih teknologi yang akan diterapkan dalam usaha taninya (Saragih, 2002). Dengan demikian keberhasilan petani dalam mengadopsi teknologi sangat bergantung pada hasil yang dilihat dan dorongan diseminasi hasil kajian. Menurut Tarigans (2005) petani memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui aplikasi teknologi. Aplikasi paket teknologi akan berhasil karena petani diberi kebebasan untuk memilih dan menggunakan teknologi untuk jangka waktu yang lama sesuai kebutuhannya. Lembaga penelitian dan penyuluhan melalui pendampingan akan meningkatkan produksi dan kualitas dari produk yang dihasilkan.

Subsistem Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelapa

Pada subsistem agribisnis pengolahan untuk produk kelapa yang dapat dihasilkan dapat berupa produk sekunder seperti kopra baik dengan kualitas kopra hitam maupun kopra putih, minyak kelapa baik yang diolah secara tradisional maupun secara mekanis, limbah kopra berupa bungkil, kelapa parut

(*desiccated coconut*), sabut, tempurung dan arang tempurung, nata de coco, santan, produk kuliner berbasis kelapa, dan minyak kelapa murni (VCO). Selain itu, kelapa juga dapat dikonsumsi segar seperti buah segar/kelapa muda. Proses pengolahan produk kelapa dapat dilakukan secara konvensional (tradisional) ataupun mekanisasi. Secara tradisional memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan tenaga yang banyak. Pada saat ini sudah tersedia alat-alat pengolahan kelapa mekanis untuk memudahkan dan mempercepat proses pengolahan hasil, seperti peralatan/mesin pengecilan ukuran dan alat bantu industry kreatif untuk memproduksi barang seni berbasis kelapa.

Petani Kelapa di Maluku Utara masih terbatas dalam menghasilkan produk pengolahan kelapa. Kopra merupakan produk utama olahan kelapa dan sebagian kecil petani menjual dalam bentuk segar (kelapa muda). Peningkatan nilai tambah kelapa terus dilakukan dengan inovasi produk kelapa yang bernilai ekonomis dan prospek pasar yang menjanjikan. Inovasi produk yang dihasilkan oleh BPTP terkait olahan kelapa antara lain kopra putih, asap cair yang digunakan untuk bio pestisida, dan arang tempurung. Produk lain yang dihasilkan berupa selai lembaran dan pemanfaatan air kelapa untuk pembuatan sirup.

Rantai pemasaran kopra di Maluku Utara yang terbanyak (90 %) adalah petani ke pedagang desa dan pedagang desa ke pedagang pengumpul di kecamatan, kemudian pedagang di kecamatan disalurkan ke pedagang di kabupaten. Selanjutnya pedagang kabupaten ke pedagang besar (agen di provinsi). Kelapa butiran biasanya banyak diperjualbelikan di kota kabupaten atau kota Provinsi yang banyak daerah wisatanya, pedagang langsung membeli ke lokasi petani di daerah sekitarnya.

Subsistem kelembagaan

Peningkatan kapasitas SDM petani kelapa melalui pendidikan dan pelatihan belum banyak dilakukan. Kegiatan penyuluhan lapangan sudah mulai berkembang di wilayah Maluku Utara oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), namun dalam inovasi teknologi kapasitas penyuluh tersebut masih sangat bervariasi salah satunya karena faktor keahlian penyuluh dari spesifikasi keilmuannya yang berbeda. Keberadaan

kelembagaan petani di tingkat desa perlu dukungan yang optimal untuk dapat menjalankan sistem agribisnis. Berkembang tidak suatu kegiatan agribisnis dipengaruhi kelembagaan petani. kegiatan usahatani kelapa dalam agribisnis yang dijalankan membutuhkan investasi cukup besar, di mana seharusnya kelembagaan kredit seperti perbankan ataupun Lembaga Keuangan lainnya dapat membiayai dalam permodalannya.

Indikator kinerja balai penelitian dan pengkajian teknologi salah satunya adalah rekomendasi teknologi yang dihasilkan dan peningkatan pendapatan petani. BPTP Maluku Utara pada tahun 2018-2019 melakukan Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018. Pelatihan dan bimbingan langsung kepada petani kelapa tersebut dilakukan dalam upaya peningkatan nilai daya saing produk dan kelembagaan petani yang handal. Peningkatan nilai tambah produk dilakukan dengan pelatihan pembuatan kopra putih, arang tempurung, dan asap cair yang dilakukan kepada anggota kelompok Tunas Tani di Kabupaten Halmahera Utara. Penguatan kelembagaan petani yang dibina dalam bentuk koperasi tani Agro Pandawa Duta yang sudah berbadan hukum Nomor : AHU-0000834.AH.01.26.Tahun 2019 dan Akta Pendirian Nomor 5 Tgl. 18 November 2019. Adanya koperasi tersebut dapat memudahkan dalam pengelolaan usahatani kelapa di Desa Sukamaju dan proses agribisnis kelapa yang dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani (Hartanto, S. *et al*, 2019).

SIMPULAN

Strategi yang dapat dikemukakan dalam pengembangan agribisnis di Maluku Utara kedepannya adalah 1) Pendekatan sistem dalam pengembangan agribisnis berkelanjutan, 2) Berdayakan Potensi dan karakteristik wilayah kepulauan, 3) Dukungan dari pemerintah daerah berupa regulasi dan infrastruktur, 4) Komoditas pertanian tertentu harus diolah di Maluku Utara (industrialisasi pertanian), 5) Agribisnis berbasis komoditas unggulan dan daya saing, 6) Peningkatan kapasitas SDM Petani dan UMKM, 7) Pola kemitraan dalam pengembangan agribisnis, dan 8) Memacu pertumbuhan sektor terkait di

luar pertanian. Disamping itu Pengembangan agribisnis komoditas unggulan ke depan harus memperhatikan factor biofisik lingkungan yang membatasi (*limiting factors*) agar dapat tempuh langkah-langkah untuk peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tersebut. Penetapan zonasi agroekologi suatu komoditas dan kemudahan petani dalam membangun agribisnis melalui pendekatan subsistem mulai dari subsistem agribisnis input sampai dengan subsistem agribisnis kelembagaan penunjang dilengkapi dengan penerapan teknologi dan bimbingan teknis yang sesuai kebutuhan. Peningkatan daya saing produk unggulan pertanian yang dilakukan melalui pengembangan agribisnis dalam perspektif industrialisasi pertanian dengan pendekatan pengembangan agribisnis sebagai suatu system agribisnis berkelanjutan akan menghasilkan produk pertanian yang sesuai dengan permintaan pasar dan preferensi konsumen sebagai pengguna akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, M. 2000. *Sistem Pengembangan Agribisnis Hortikultura Berkelanjutan Dan Berdaya Saing Tinggi di Kawasan Timur Indonesia*. Makalah Seminar Pada “Pertemuan Sosialisasi Program dan Organisasi Hortikultura dan Aneka Tanaman Wilayah Timur Indonesia, 12 Desember 2000”. Direktorat Jenderal Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman. Departemen Pertanian RI. Denpasar. Bali.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Maluku Utara Dalam Angka. BPS Provinsi Maluku Utara. Ternate.
- Barus, J. 2013. Pemanfaatan Lahan di bawah Tegakan Kelapa di Lampung. *Jurnal Lahan Suboptimal*. 2(1): 68-74 .
- Damanik, S. 2007. Strategi Pengembangan Agribisnis Kelapa (*Cocos nucifera*) untuk Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. *PERSPEKTIF* Volume 6 Nomor 2, Desember 2007 : 94 – 104.
- Davis, H. J. and R.A. Golberg. 1957. *A Concept of Agribusiness*. Harvard Graduate School of Business Administration. Boston, Massachusetts.

- Dinas Pertanian Prov.Maluku Utara, 2019.Laporan Penyusunan Master Plan Pembangunan kawasan perkebunan Kelapa berbasis korporasi di Kabupaten Morotai Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Utara. Sofifi.Maluku Utara.
- Downey, W. David and Steven, P. Erickson. 1987. *Agribusiness Management*. Mc Graw-Hill Book Company, New York, Second Edition.
- Hidayat, Y., Fredy Lala, Suwitono, B., Bayu Aji, H., dan Brahmantiyo, B. 2020. Implementasi Teknologi Peningkatan Produktivitas Lahan Kering di Bawah Tegakan Kelapa di Maluku Utara. Buletin Palma Volume 21 No. 1, Juni 2020: 11 – 21.
- Muta'ali. L., 2003. Teknik Penyusunan Rencana Strategis Dalam Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta
- Saragih, B. 1998. *Kumpulan Pemikiran Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Yayasan Persada Mulia Indonesia.
- Saragih, B.2001. Membangun Sistem Agribisnis. Suara dari Bogor. Yayasan USESE, Pustaka Wirausaha Muda. Edisi kedua. Bogor. 206 hlm.
- Saragih, B. 2002. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan system agribisnis kerakyatan dan berkelanjutan. Analisis kebijaksanaan pendekatan pembangunan dan kebijaksanaan Pengembangan Agribisnis. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Monograf 22 : 8 hlm.
- Slamet, H.,Jasil. S.,dan Hidayat,Y., 2019.Laporan Akhir Pendampingan kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi.BPTP Maluku Utara.
- Tarigans, D.D. 2005. Diversifikasi usahatani kelapa sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan petani. Perspektif Review Penelitian Tanaman Industri 4(2) : 71-78.